

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Geografi

Pengertian geografi berdasarkan hasil semlok Ikatan Geograf Indonesia dalam Nursid Sumaatmadja (2001: 11) adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Sedangkan menurut Blij dan Muller dalam Bambang Syaeful Hadi (2009: 1) menyebutkan bahwa geografi mempelajari lokasi-lokasi dan distribusi *feature* permukaan bumi. Lebih lengkap dijelaskan bahwa *feature* yang dimaksud antara lain hunian manusia atau sifat-sifat lingkungan alam, tetapi aspek yang paling menarik adalah interelasi antara lingkungan alam dengan masyarakat manusia. Sebagai sebuah ilmu, terdapat pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menelaah fenomena geosfer, adapun pendekatan keilmuan tersebut terdiri dari tiga pendekatan berikut ini:

a. Pendekatan Keruangan

Suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini variabel ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis. Ditilik dari dimensi praktis, ruang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari

permukaan bumi yang mampu mengakomodasikan berbagai bentuk kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya (Hadi Sabari Yunus, 2010: 44).

Ada dua tema analisis dalam pendekatan ruang yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1) Analisis Interaksi Keruangan (*spatial interaction analysis*)

Interaksi atau imbal daya adalah merupakan suatu proses saling memengaruhi antara dua hal. Oleh karena istilah interaksi dikaitkan dengan ruang maka proses saling memengaruhi juga antar ruang yang bersangkutan. Pada awalnya istilah interaksi keruangan (*spatial interaction*) ini diperkenalkan oleh Ullman dalam Hadi Sabari Yunus, (2010: 64) yakni “*Spatial interaction emphasizes the interdependence of area and implies the movement of commodities, good, people, information etc.between areas*”.

2) Analisis Komparasi Keruangan (*spatial comparison analysis*)

Analisis ini menekankan pada komparasi/pembandingan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, minimal ada dua wilayah yang diteliti. Tujuan praktis yang banyak dilakukan adalah upaya mengetahui keunggulan dan kelemahan yang ada pada masing-masing wilayah dalam hal yang sama sehingga dapat diketahui upaya untuk menentukan kebijakan pengembangan wilayah (Hadi Sabari Yunus, 2010: 73).

b. Pendekatan Ekologi (*Ecological Approach*)

Studi berkenaan interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Dalam mempelajari ekologi, seseorang harus juga mempelajari organisme hidup, yaitu manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungannya yang mencakup litosfer, hidrosfer, dan atmosfer (Bintarto dan Surastopo, 1979: 18).

Bidang kajian geografi merupakan bidang kajian yang bersifat “*human oriented*”, dengan demikian interelasi antara manusia dan atau kegiatannya dengan lingkungannya menjadi topik utama dalam ilmu geografi. Berdasarkan inventarisasi penelitian yang ada dapat di simpulkan bahwa pendekatan ekologi dalam geografi mempunyai empat tema analisis yaitu:

- 1) *Man-environment analysis*, fokus kajian pada manusia dengan lingkungan.
- 2) *Human activity-environment analysis*, fokus kajiannya terletak pada kegiatan manusia hubungannya dengan lingkungan sekitar kehidupan manusia.
- 3) *Phsyco natural features-environment analysis*, analisis ini menekankan pada keterkaitan antara kenampakan-kenampakanfisikal alami dengan elemen-elemen lingkungannya.
- 4) *Phsyco artificial features-environment analysis*, tema analisis ini menekankan pada lingkungan fisik yang terjadi sebagai akibat dari

aktivitas manusia (hasil budaya manusia) dengan lingkungannya (Hadi Sabari Yunus, 2010: 94-95).

c. Pendekatan Kompleks Wilayah (*Regional Complex Approach*)

Pendekatan keberagaman wilayah (*areal differentiation*) merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dengan pendekatan ekologi. Pada pendekatan ini, daerah (*region*) didekati dengan pengertian *areal differentiation*, yaitu interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakekatnya suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah yang lainnya. Akibat dari perbedaan tersebut akan muncul permintaan dan penawaran. Pada analisa dengan menggunakan pendekatan tersebut diperhatikan pula persebaran fenomena tertentu (analisa keruangan) dan interaksi antara variabel manusia dengan lingkungan yang kemudian dipelajari kaitannya (analisa ekologi). Berkenaan dengan analisa kompleks wilayah, prakiraan wilayah (*regional forecasting*) dan perencanaan wilayah (*regional planning*) merupakan aspek yang dianalisa (Bintarto dan Surastopo, 1979: 24-25).

2. Pembangunan

Pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Johara T Jayadinata (1999: 4) ialah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Pembangunan dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dapat berupa pembangunan fisik dan dapat berupa pembangunan sosial ekonomi. Menurut Siagian (2001) dalam

Syafi'i (2009: 8), pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

3. Pengertian Daerah

Menurut Lincoln Arsyad (2004: 297) ditinjau dari aspek ekonomi daerah mempunyai tiga pengertian yaitu:

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapita, sosial-budaya, geografis dan sebagainya. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah homogen.
- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah nodal.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi daerah dalam pengertian seperti ini di namakan daerah perencanaan atau daerah administratif.

Dalam praktik yang membahas perencanaan pembangunan ekonomi daerah maka pengertian yang ketiga tersebut di atas yang lebih banyak digunakan, karena:

- a. Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai lembaga pemerintah. Oleh karena itu, akan lebih praktis jika suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan satuan administratif yang ada.
- b. Daerah yang batasannya ditentukan secara administratif lebih mudah dianalisis, karena biasanya pengumpulan data di berbagai daerah dalam suatu negara, pembagiannya didasarkan pada satuan administratif (Lincoln Arsyad, 2004: 297-298).

4. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pengertian lain, Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan

masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Lincoln Arsyad, 2004: 298).

5. Teori Pembangunan Regional “*Center-Down*”

Menurut Yerimias T. Keban (1995: 8-25) adalah Ide dasar dari paradigma ini adalah ketimpangan spasial dalam konteks ekonomi dapat dikurangi melalui fungsi integrasi yang efektif baik dalam skala nasional maupun internasional. Pembangunan akan terjadi bila ada permintaan dari luar dan kegiatan inovatif, akan berkembang meluas dari satu atau beberapa titik, ketitik lain yang lebih luas secara spontan (*trickledown effect*). pembangunan didominasi perkotaan “*capital intensive*”, dan didominasi teknologi modern dan proyek besar. Beberapa Teori ekonomi yang tergolong dalam paradigam tersebut adalah:

a. *Interregional Trade Theory* (B.G. Ohlin, 1933)

Pertumbuhan terjadi apabila terjadi interaksi perdagangan antara dua daerah berdasarkan prinsip “*comperative advantage*”. Prinsip menguntungkan kedua daerah yang terlibat asal kedua daerah memiliki kebutuhan yang berlainan dan saling mengisi. Contoh: daerah a kekurangan makanan jenis x dan kelebihan jenis y, sedangkan daerah b kekurangan makanan jenis y tetapi kelebihan jenis x. hal ini diasumsikan bahwa

kelimpahan masing-masing didukung biaya yang murah dalam perdagangan masing-masing dapat memperoleh keuntungan komperatif.

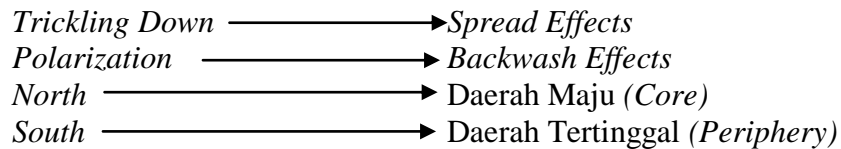
b. *Export Base Theory* (D. North, 1955)

Produksi barang untuk ekspor sangat berguna untuk pertumbuhan suatu daerah. Daerah tidak akan tumbuh tanpa transfer uang dari luar. Produksi komoditas ekspor tersebut akan murah apabila ditunjang oleh perbaikan fasilitas dan infrastruktur transportasi “*comperative advantage*” dengan merangsang kegiatan ekspor maka kegiatan “*residential sector*” untuk kebutuhan lokal terangsang secara otomatis melalui efek “*multiplier*”

c. *Circular and Cumulative Causation* (Myrdal, 1969)

Asumsi bahwa pertumbuhan mengalir dari pusat ke bawah (sekitar) perlu ditinjau karena adanya *circular* dan *cumulative causation*. *Circular and cumulative causation* merupakan suatu mekanisme pasar dimana perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan industri akan kembali memperkuat kegiatan industri itu sendiri melalui suatu rentetan akibat kumulatif dan *circular* sifatnya. Daerah maju semakin maju daerah yang belum berkembang semakin tertinggal “*backwash effects*”. Teori benar apabila terjadi dalam mekanisme pasar bebas tanpa intervensi kebijakan pemerintah.

d. *Trickling Down Theory and Polarization Effects* (Albert Hirschman, 1958)



Menurut Hirschman, *North* selalu menghisap sumberdaya di *South*, tanpa memberi kembali efek “*trickling down*” ke *South*, sehingga *South* menjadi lebih parah dari pada sebelumnya “*blight effects*”. interaksi seperti ini dapat juga diterapkan antara daerah kota dengan desa atau daerah belakangnya. Kota yang menunjukkan gejala merugikan daerah belakang “*parasitic*”.

Perbedaan Myrdal dan Hirschman adalah Myrdal negara ketiga terjebak *cumulative causation*. Sedangkan Hirschman: tidak selamanya berakhir dengan proses *cumulative causation*, optimis bahwa *polarization* dapat dicegah, karena berkeyakinan pemerintah akan ikut campur dalam pemecahan ketimpangan, lewat pajak progresif.

e. *Growth Pole Theory* (Francois Perroux, 1950)

Pertumbuhan dan pembangunan sektor industri disuatu daerah menekankan aspek keruangan ekonomi. Suatu unit yang memiliki dominasi terhadap lingkungannya, menentukan arah dan tingkat pertumbuhan dan pembangunan dari semua unit yang ada dibawah pengaruhnya.

f. *Central Place Theory* (Christaller, Losch, 1954, Zipf, 1941, Berry dan Garrison, 1958)

Teori ini timbul sebagai akibat dari tiga jenis prinsip yaitu prinsip herarkhi, penduduk ambang (*threshold population*) dan lingkup pasar (*market range*).

1) Prinsip Herarkhi

Menunjukkan ada tiga tingkatan dalam kegiatan pelayanan mulai dari pusat sampai daerah. Suatu daerah yang besar (*central place*) akan memiliki jenis barang dan jasa yang bersifat bertingkat yaitu tidak hanya dibutuhkan oleh pusat-pusat yang kecil tetapi juga oleh pusat, pusat kecil hanya memiliki barang lokal saja, dalam kenyataan kota besar memiliki kegiatan yang lengkap sementara kota kecil kegiatannya terbatas.

2) Prinsip Penduduk Ambang

Jumlah minimum penduduk yang harus ada untuk menopang suatu kegiatan jasa.

3) prinsip Lingkup Pasar

Jarak yang rela ditempuh oleh penduduk untuk mencapai tempat penjualan atau mendapatkan pelayanan jasa tersebut, diluar tempat itu orang akan mencari tempat pelayanan lain berdasarkan prinsip tersebut, diteorikan pelayanan berbentuk lingkaran, dengan bantuan kelancaran

komunikasi dan transportasi timbul pusat pelayanan lainnya saling singgung menyinggung.

g. *Diffusion Theory*

Merupakan pengembangan dari karya (Hagerstrand,1952; Riddle,1969; Morrill,1968; Colenutt,1969), peranan pembangunannya ditonjolkan oleh Berry (1972). Teori ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi lebih dahulu dan puncaknya hanya pada daerah tertentu saja, pertumbuhan disebarkan secara hierarkis melalui *central place*, pusat pertumbuhan nasional dan regional.

h. *John Friedmann's Core-Periphery Model* (1966)

Friedmann (1966) membagi daerah atas dua yaitu inti (*core*), belakang (*periphery*). *Core* sumber pembangunan, inovasi cenderung menyebar ke pinggiran. *core* menarik individu yang kreatif dan inovatif, membentuk lingkungan yang kondusif. *Core* mendekati pembangunan daerah *periphery* (tergantung *core*). Dua hubungan tersebut tetap dipertahankan tergantung dari proses interaksi para elit. hal ini akan timbul:

- 1) Supresi elit dari *periphery*
- 2) Netralisasi elit *periphery*
- 3) Pergantian pusat oleh elit *periphery*
- 4) Seleksi *periphery* oleh elit *center*.

Akibat *periphery* interaksi dan informasi *periphery* berkembang dan berusaha menekan elit *core* untuk mengurangi ketergantungan. Daerah

periphery akhirnya berkembang dan berdiri sendiri, menjadi core baru. hubungan antara keduanya terdapat hierarki daerah *core* dan *periphery*

i. Teori Gabungan

Konsep dominasi hubungan *core* dan merupakan gejala polarisasi. Dominasi ada dua komponen yang komplementer, yaitu Ekstratif, bila lebih banyak mengambil untung dari *periphery*, distributif kalau sebaliknya, sehingga memungkinkan *periphery* untuk membangun.

Core menciptakan dan mengendalikan organisasi *periphery*. *core* menjadi pusat pengambilan keputusan dan semua kebijakan. Pengaturan seperti ini *core* tetap mendominasi *periphery*, tetapi perlu kesadaran elit *periphery*.

j. *General Theory* (Siebert, 1969)

analisis dua daerah:

- 1) Perbedaan pertumbuhan akan menjadi lebih besar, kalau semakin kuat perbedaan penemuan dan semakin rendah mobilitas difusi pengetahuan teknik
- 2) Pertumbuhan regional berkorelasi dengan tingkat pertumbuhan modal dan suplai tenaga kerja
- 3) Semakin besar bobot suatu faktor dalam fungsi produksi semakin tinggi tingkatan pertumbuhan dari region tersebut

Output regional (pertumbuhan) suatu daerah dapat dipengaruhi oleh fungsi *capital, labor, land, transport, resources, technical knowledge dan social system*

6. Pengertian Wilayah untuk Kebutuhan Pembangunan

Pengertian wilayah yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat berarti suatu wilayah yang sangat sempit atau sangat luas, sepanjang didalamnya terdapat unsur ruang atau *space* (Tarigan, 2008: 113). Untuk kepentingan perencanaan maka wilayah harus dapat dibagi (*partitioning*) atau dikelompokkan (*grouping*) ke dalam suatu kesatuan agar bisa dibedakan dengan kesatuan lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Damandiri, 2009: 14).

Pengertian wilayah dalam geografi menurut Johara T Jayadinata (1999: 13) merupakan kesatuan alam yaitu alam yang serba sama atau homogen, atau seragam (*uniform*), dan kesatuan manusia, yaitu masyarakat manusia beserta kebudayaannya yang serba sama yang memiliki ciri yang khas, sehingga wilayah tersebut dapat dibedakan dari wilayah lain.

7. Pengembangan Wilayah

Menurut Dirjen Penataan Ruang (2005: 3), secara konseptual pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya

untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Berpijak pada pengertian di atas maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka pemerintah menempuh upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Adapun proses yang telah disusun Dirjen Penataan Ruang (2005: 3) yakni:

- a. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Di samping sebagai "*guidance of future actions*" RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*).

- b. Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
- c. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

8. Tujuan Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah yaitu setiap tindakan pemerintah yang akan dilakukan bersama-sama dengan para pelakunya dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi wilayah itu sendiri maupun bagi kesatuan administratif dimana wilayah itu menjadi bagiannya (Mulyanto, 2008: 2).

Mulyanto (2008: 3) juga menyebutkan pada dasarnya pengembangan wilayah dapat dikelompokkan menjadi usaha mencapai tujuan bagi kepentingan-kepentingan di dalam kerangka asas.

a. Sosial

Usaha-usaha mencapai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kualitas individu, keluarga, dan seluruh masyarakat di dalam wilayah itu diantaranya dengan mengurangi pengangguran dan menyediakan lapangan kerja serta menyediakan prasarana-prasarana kehidupan yang baik seperti permukiman, fasilitas transportasi, kesehatan, sanitasi, air minum dan kebutuhan lainnya.

b. Ekonomi

Usaha-usaha mempertahankan dan memacu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang memadai untuk mempertahankan kesinambungan dan perbaikan kondisi-kondisi ekonomis yang baik bagi kehidupan dan memungkinkan pertumbuhan ke arah yang lebih baik.

c. Wawasan Lingkungan

Pencegahan kerusakan dan pelestarian terhadap keseimbangan lingkungan. Aktivitas sekecil apapun dari manusia yang mengambil sesuatu dari, atau memanfaatkan potensi alam, sedikit banyak akan mempengaruhi keseimbangannya. Apabila tidak diwaspadai maka akan timbul dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Untuk mencegah hal tersebut maka harus dilakukan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan dengan tujuan mencegah kerusakan, menjaga keseimbangan dan melestarikan kelestarian alam.

9. Manajemen Pengembangan Wilayah

Pelaksanaan pengembangan wilayah akan dapat menghasilkan produk-produk dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan, apabila ditunjang dengan sistem manajemen yang baik, yang harus dilakukan oleh pimpinan wilayah beserta perangkatnya. Menurut Mulyanto (2008: 54-62) manajemen yang baik diseluruh tahapan dan tataran pelaksanaan pengembangan wilayah dituntut sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu program pengembangan, dan ini harus meliputi segi-segi:

a. *Planning*

Kesempurnaan dan dipenuhinya syarat-syarat tertentu, harus dicapai untuk membuat suatu perencanaan yang baik sesuai dengan apa yang ditentukan dalam strategi pengembangan wilayah. Planning yang tersusun rapi dan terpadu atau *integrated*, menyeluruh atau *comprehensive* menjadikan seluruh proses manajemen pengembangan wilayah menjadi mudah.

b. *Organizing*

- 1) Pembuatan rencana-rencana komprehensif dari tahapan-tahapan pengembangan wilayah.
- 2) Penyusunan rencana pengadaan dana yang akan diperlukan dalam melaksanakan program-program pengembangan wilayah, alokasi bagi setiap program dan jadwal penyediaan dana itu.
- 3) Penyusunan organisasi/team pelaksana program yang efektif, efisien, maupun bekerja sama dan mempunyai integritas yang baik.

Di masa lalu suatu proyek pengembangan dilakukan dengan tahapan tahapan yang satu sama lain terisolasi dan berturutan (tidak sinkron) sehingga tidak efisien dan memakan waktu. Kecenderungan sekarang adalah melakukannya dengan membentuk suatu tim untuk melaksanakan setiap tahapan pengembangan dalam usaha bersama kelompok/tim menyelesaikan suatu tugas.

Kerjasama tim adalah suatu konsep dimana para anggotanya bekerja sama dalam ketergantungan antar anggota dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Setiap anggota tim merasa memiliki tugasnya masing-masing yang menjadi bagian dari program yang harus diselesaikan. Suatu tim yang efektif menjadi sarana perantara mencapai hasil-hasil yang baik dan berkelanjutan. Pembentukan tim untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu kegiatan pengembangan wilayah, penunjukan ketua tim dan anggota tim mencakup berbagai golongan fungsional seperti para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu atau teknik, serta manajemen sumberdaya manusia.

Tujuan pembentukan tim adalah mendukung pelaksanaan manajemen yang baik pada pengembangan wilayah untuk menciptakan kondisi kerja dimana akan ditaatinya disiplin-disiplin program, waktu, mutu dan anggaran. Objektif-objektif manajemen ini dicapai melalui koordinasi kerjasama tim yang lebih baik pada prosesnya, dalam mengenali dan menghindari atau menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan efektif.

c. *Actuating*

Pengaturan pelaksanaan seluruh program-program sesuai dengan program, jadwal, kualitas, dana tersedia, dan lain-lain yang telah ditentukan.

d. *Controlling*

Pengawasan yang komprehensif dan lugas terutama yang bersifat preventif agar tidak terjadi kesalahan maupun penyimpangan dari proses pelaksanaan program-program pengembangan wilayah. Manajemen harus mampu mengambil tindakan pencegahan (*preventive*) serta dapat dan berani mengambil tindakan *repressive* terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan.

10. Prinsip Dasar Pengembangan Wilayah

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Dirjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah:

- a. Sebagai *growth center*. Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spread effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.
- b. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.
- c. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.

- d. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Pemetaan *strategic development region*, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme di antaranya (Damandiri, 2009: 16).

11. Daya Dukung Wilayah

Pengertian daya dukung di bedakan menjadi enam konsep dalam Muta'ali (2012: 9), yaitu:

- a. Konsep ekonomi, daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam mendukung penduduknya untuk hidup pada tingkat yang layak, di atas garis kemiskinan. Secara operasional diindikasikan dengan jumlah penduduk miskin.
- b. Konsep sosial, daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam mendukung penduduknya untuk dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya seperti beribadah, pendidikan, dan kesehatan, berbelanja, dan lain sebagainya.
- c. Konsep pangan, daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam memberikan atau mencukupi kebutuhan pangan dari daerahnya sendiri (swasembada).

- d. Konsep papan (permukiman), daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam memberikan atau mencukupi kebutuhan lahan untuk permukiman dan permukiman itu sendiri.
- e. Konsep lingkungan, daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam memberikan lingkungan yang baik tanpa merusak lingkungan bagi penduduk yang tinggal. Secara operasional diindikasikan dengan dinamika tekanan penduduk terhadap lahan pertanian.
- f. Konsep mobilitas, daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam memberikan kebebasan dan ruang gerak yang baik kepada penduduknya untuk melakukan mobilitas.
- g. Konsep tata ruang, daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam memberikan pola keseimbangan peruntukan fungsi wilayah antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.

12. Pengembangan Kawasan

Asumsi dasar pengembangan kawasan ini adalah bahwa proses pembangunan berlangsung secara ekulibrium matriks lokasi yang terdiri dari beberapa pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles*) dan daerah penyangga (*hinterland*). Di dalam matriks lokasi, industri-industri yang maju (*leading industries*) menciptakan kaitan ke depan dan ke belakang di dalam sistem ekonomi dan *juxtaposisi spatial* dari industri-industri telah menciptakan aglomerasi ekonomi yang mendorong *locational efficiency* pada pusat-pusat pertumbuhan (Moeljarto Tjokrowinoto, 1996: 119).

Hubungan input-output dari serangkaian industri yang berteknologi tinggi yang bersifat propulsive dan elastis dengan industri-industri yang lebih sederhana (*lagging industries*) menimbulkan proses difusi dan efek-tebar yang akan mengakselerasikan proses industrialisasi dan urbanisasi. Karena kegagalan mekanisme pasar untuk mewujudkan efek tetesan, maka timbullah upaya untuk merencanakan pusat-pusat pertumbuhan di dalam kerangka pengembangan kawasan yang terkendali (Friedman, 1975) dalam Moeljarto Tjokrowinoto (1996: 119).

13. Pengertian Daya Saing

Pengertian daya saing menurut *World Economic Forum* (WEF) dalam Joko Christanto (2011: 50), menyatakan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Institute of Management and Development (IMD) dalam Abdullah, dkk (2002: 12) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globalitas dan proksimitas, serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan sosial.

Daya saing dapat dibedakan dalam berbagai tingkatan. Daya saing nasional mengacu kepada kemampuan suatu negara untuk memasarkan produk yang dihasilkan negara itu relatif terhadap kemampuan negara lain.

Sedangkan daya saing daerah mempunyai arti yang sama dengan daya saing nasional, namun pada skala daerah. Suatu daerah yang mampu bersaing dengan daerah lain dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasanya disebut mempunyai daya saing tinggi (Joko Christanto, 2011: 51). Pengertian daya saing daerah menurut Abdullah, dkk (2002: 15) adalah Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

14. Arti Penting Daya Saing

Konsep daya saing berkembang dari level mikro pada tingkat perusahaan ke level makro pada tingkat negara. Di antara dua level tersebut kemudian berkembang konsep daya saing pada tingkat regional.

- a. Pada tingkat perusahaan, daya saing diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk terus-menerus menstimulasi pembangunan melalui peningkatan produktivitas dan perluasan pasar.
- b. Sedangkan pada tingkat negara, daya saing diartikan sebagai kemampuan negara untuk meningkatkan trend pertumbuhan ekonomi, produktivitas sumber-sumber ekonomi dan pertumbuhan faktor-faktor penentu produktivitas serta ekspansi ekonomi ke pasar internasional.
- c. Daya saing regional diartikan sebagai kemampuan wilayah untuk menciptakan pendapatan yang tinggi dan berkembang bagi warganya serta berkembangnya sumber-sumber mata pencaharian penduduk di wilayah

tersebut. Di sini ada penekanan adanya hubungan yang kuat antara daya saing regional dengan kemakmuran regional.

Pada level global pengukuran daya saing telah banyak dikembangkan, di antaranya:

- a. Metode Daya Saing *Institute for Management Development* (IMD) dalam *The World Competitiveness Yearbook* (WCY) sejak tahun 1989.
- b. Metode Daya Saing *World Economic Forum* (WEF) yang disebut *Global Competitiveness Index* (GCI) sejak tahun 2005.
- c. Metode Daya Saing *University of Wales institute, Cardiff* (UWC) tahun 2004 dan 2006.
- d. Metode Daya Saing *The Association of European Chambers of Commerce and Industry* (EUROCHAMBERS) pada tahun 2007.
- e. Metode Daya Saing *Joint Research Centre* (JRC) yang dinamakan *EU Regional Competitiveness Index* (RCI).

Di antara berbagai pendekatan tersebut ada kesamaan pandang bahwa daya saing terkait dengan produktivitas. Kompleksitas konsep daya saing menjadikan daya saing sebagai ukuran yang bersifat relatif yaitu tergantung pada level mana konsep tersebut diukur (Disnakertrans DIY, 2011: 4).

15. Analisis Keruangan/Analisis Spasial

a. Teori Potensi Penduduk

Teori ini digunakan untuk melihat besarnya potensi penduduk antar titik atau kota. Dinyatakan dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 PP\ 1 &= \frac{P_1}{\left(\frac{1}{2}J_1\right)^2} + \frac{P_2}{(J_{1.2})^2} + \frac{P_3}{(J_{1.3})^2} + \frac{P_4}{(J_{1.4})^2} + \dots + \frac{P_n}{(J_{1.n})^2} \\
 PP\ 2 &= \frac{P_1}{(J_{2.1})^2} + \frac{P_2}{\left(\frac{1}{2}J_2\right)^2} + \frac{P_3}{(J_{2.3})^2} + \frac{P_4}{(J_{2.4})^2} + \dots + \frac{P_n}{(J_{2.n})^2} \\
 PP\ 3 &= \frac{P_1}{(J_{3.1})^2} + \frac{P_2}{(J_{3.2})^2} + \frac{P_3}{\left(\frac{1}{2}J_3\right)^2} + \frac{P_4}{(J_{3.4})^2} + \dots + \frac{P_n}{(J_{3.n})^2} \\
 PP\ n &= \frac{P_1}{(J_{n.1})^2} + \frac{P_2}{(J_{n.2})^2} + \frac{P_3}{(J_{n.3})^2} + \frac{P_4}{(J_{n.4})^2} + \dots + \frac{P_n}{\left(\frac{1}{2}J_n\right)^2}
 \end{aligned}$$

Sumber: Bintarto dan Surastopo, 1991: 82

Keterangan :

PP 1 = Potensi penduduk tempat 1

PP 2 = Potensi penduduk tempat 2

PP 3 = Potensi penduduk tempat 3

PP n = Potensi penduduk tempat n

P 1 = Jumlah penduduk tempat 1

P 2 = Jumlah penduduk tempat 2

P 3 = Jumlah penduduk tempat 3

P n = Jumlah penduduk tempat n

J 1 = Jarak jalan terdekat dari tempat 1

J 2 = Jarak jalan terdekat dari tempat 2

J 3 = Jarak jalan terdekat dari tempat 3

n = Jumlah titik

Nilai potensi penduduk (PP1, PP2, PP3, PPn) menunjukkan potensi aliran (*flow potential*) untuk tiap tempat. Peta potensi dapat digambarkan

dengan garis kontur yang menghubungkan tempat-tempat dengan potensi penduduk yang sama yaitu dinyatakan dalam persentase terhadap tempat dengan potensi penduduk yang tertinggi (Bintarto dan Surastopo, 1991: 82).

Formula untuk mendapatkan persentase dapat menggunakan:

$$\text{Persentase} = \frac{PP_n}{PP_{\text{tertinggi}}} \times 100\%$$

b. Teori Interaksi Menggunakan Model Gravitasi

Model gravitasi yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton (1687) dalam Bintarto dan Surastopo (1991: 80) menyatakan bahwa dua benda akan tarik menarik dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak pangkat dua.

Untuk memprediksi interaksi berdasarkan model gravitasi ini, massa kedua benda tersebut ialah jumlah penduduk suatu wilayah. Benda yang dimaksud ialah titik yang dianalogikan sebagai kota atau pusat berkumpulnya penduduk dalam wilayah tertentu. Untuk menghitung interaksi ini digunakan rumus:

$$I_{12} = \frac{P_1 \cdot P_2}{J_{12}^2}$$

Keterangan:

- I12 = interaksi antara wilayah 1 dengan wilayah 2
P1 = jumlah penduduk wilayah 1
P2 = jumlah penduduk wilayah 2
J12² = jarak antara wilayah 1 dan 2 dikuadratkan (Bintarto dan Surastopo, 1991: 80).

c. Sistem Informasi Geografi (SIG)

Data dengan basis keruangan saat ini merupakan salah satu elemen paling penting, karena berfungsi sebagai pondasi dalam melaksanakan dan mendukung berbagai macam aplikasi. Sebagai contoh dalam bidang lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, tata ruang, manajemen transportasi, pengairan sumberdaya mineral, sosial dan ekonomi, dan lain-lain. Aplikasi SIG menyediakan suatu sistem pangkalan data (database) yang efektif guna menjalankan proses-proses pembangunan tersebut. SIG dapat menyediakan data fisik wilayah yang akurat, lengkap dan komperhensif sesuai dengan kebutuhan pembangunan fisik wilayah. SIG adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapat gambaran situasi ruang muka bumi atau informasi tentang ruang muka bumi yang akurat guna menjawab atau menyelesaikan suatu masalah kewilayahan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, penataan, pengolahan, penyajian data-data/fakta yang ada atau terdapat dalam ruang muka bumi tertentu. Hasil analisisnya disebut informasi geografis atau informasi spasial (Agus Suryantoro, 2008: 1).

SIG adalah sistem yang berkemampuan dalam menjawab baik pertanyaan spasial maupun pertanyaan non-spasial beserta kombinasinya (*queries*) dalam rangka memberikan solusi-solusi atas permasalahan keruangan. Artinya, sistem ini dirancang untuk mendukung berbagai analisis terhadap informasi geografis: teknik-teknik yang digunakan untuk meneliti dan mengeksplorasi data dari perspektif keruangan, untuk mengembangkan, menguji model-model, dan menyajikan kembali datanya sedemikian rupa hingga dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan. Teknik-teknik yang digunakan untuk meneliti dan mengeksplorasi data dari perspektif keruangan berada di dalam sebuah payung umum yang bernama “analisis spasial”. Teknik ini yang membedakan SIG dengan tipe-tipe sistem informasi yang lain. Teknik atau pendekatan perhitungan matematis yang terkait dengan data atau *layer* (tematik) keruangan dilakukan di dalam fungsi analisis yang satu ini. Demikian *powerful*-nya fungsi analisis spasial yang dimilikinya hingga menjadikan SIG sebagai *software tool* yang terkenal hingga saat ini (Eddy Prahasta, 2009: 363-364).

Analisa spasial adalah suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logika (matematis) yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan (potensi), hubungan (*relationships*) atau pola-pola yang (mungkin) terdapat di antara unsur-unsur geografis yang terkandung di dalam data digital dengan batas-batas wilayah tertentu. Detail mengenai teknik, jenis, fungsi, evaluasi, logika, atau operator

matematis yang digunakan di dalamnya akan bergantung pada jenis atau tipe (*query*) analisis spasial itu sendiri (Eddy Prahasta, 2009: 364).

Sementara itu, fungsi-fungsi analisis spasial antara lain terdiri:

- 1) Klasifikasi (*reclassify*): mengklasifikasikan kembali suatu data hingga menjadi data spasial baru berdasarkan kriteria (atribut) tertentu.
- 2) *Network* atau jaringan: Fungsionalitas ini merujuk data spasial titik-titik atau garis-garis sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan.
- 3) *Overlay*: Fungsionalitas ini menghasilkan *layer* data spasial baru yang merupakan hasil kombinasi dari minimal dua *layer* yang menjadi masukannya.
- 4) *Buffering*: Fungsi ini akan menghasilkan *layer* spasial baru yang berbentuk poligon dengan jarak tertentu dari unsur-unsur spasial yang menjadi masukannya.
- 5) *3D analysis*: fungsi ini terdiri dari sub-sub fungsi yang terkait dengan presentasi data spasial di dalam ruang 3 dimensi (permukaan digital).
- 6) *Digital image processing*: pada fungsionalitas ini, nilai atau intensitas dianggap sebagai fungsi sebaran (spasial) (Eddy Prahasta, 2009: 138-139).

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Rudiono (2010) pada penelitian yang berjudul “Penentuan Wilayah Prioritas Pengembangan Berdasarkan Keunggulan Komparatif Sektor Pertanian Di Kabupaten Purworejo”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui WPP di wilayah Kabupaten Purworejo, mengetahui keunggulan komparatif sektor pertanian yang dimiliki oleh WPP Kabupaten Purworejo dan menentukan arahan pengembangan di masing-masing WPP berdasarkan keunggulan komparatif sektor pertanian. Metode yang digunakan yakni deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan potensi penduduk tertinggi berada ada Kecamatan Loano untuk Sub-SWP I, Kecamatan Kutoarjo untuk Sub-SWP II, Kecamatan Purwodadi untuk Sub-SWP III, dan di Kecamatan Kemiri untuk Sub-SWP IV. Sedangkan nilai interaksi wilayah tertinggi pada Sub-SWP I berada diantara Kecamatan Loano-Purworejo, Sub-SWP II diantara Kutoarjo-Bayan, Sub SWP III diantara Purwodadi-Bagelen, dan pada Sub-SWP IV diantara Kecamatan Kemiri-Pituruh. WPP Loano dan WPP Kemiri memiliki keunggulan komparatif sektor pertanian dominan pada sub-sektor perkebunan rakyat dan kehutanan, sedangkan WPP Kutoarjo dan WPP Purwodadi dominan pada keunggulan komparatif sub-sektor peternakan. WPP dapat dikembangkan sesuai dengan keunggulan komparatif sektor pertanian. Relevansi dengan penelitian penulis adalah tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui WPP dan arah pengembangan, metode penelitian yang digunakan

juga sama. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu selain analisis data spasial dalam penelitian penulis juga menggunakan analisis IDSW untuk mengetahui daya saing antar kecamatan di Kulon Progo.

2. Ida Nurcahyani (2010) pada penelitian yang berjudul “Penentuan Desa Pusat pertumbuhan Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Pengembangan Wilayah Di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui adanya variasi antar wilayah (desa) untuk sentra pengembangan sektoral di Kecamatan Plered berdasarkan sektor basis yang dimiliki, mengetahui faktor yang paling mendominasi dalam penentuan Desa Pusat Pertumbuhan di Kecamatan Pleret dan mengetahui arahan pengembangan desa-desa yang terpilih sebagai pusat pertumbuhan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan wilayah di Kecamatan Pleret. Metode penelitian deskriptif, dengan teknik analisis LQ, *Scoring* dan deskriptif. Hasil penelitian ini dilihat dari besarnya nilai LQ terdapat variasi tiap sektor yang dapat dijadikan prioritas pengembangan, hasil perhitungan indeks komposit diketahui bahwa adanya faktor-faktor dominan dalam penentuan DPP adalah ketersediaan fasilitas pelayanan dan potensi sumber daya alam, sumber daya alam-buatan yang berujung pada tingginya perkembangan wilayah dan hasil identifikasi arahan pengembangan DPP yang terpilih diarahkan untuk kegiatan ekonomi bertumpu pada sektor sekunder dan tersier. Persamaan penelitian dengan penulis adalah perhitungan indeks komposit dan arahan pengembangan yang dilakukan setelah penentuan pusat pengembangan.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian penulis menggunakan unit analisis kecamatan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan unit analisis desa di dalam kecamatan.

3. Riswan Sepriyadi Sianturi (2010) pada penelitian yang berjudul “Kajian Komoditas Unggulan Dan Sebaran Keruangannya Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi ragam komoditas dan menyusun pewilayahannya, mengetahui ragam dan sebaran komoditas unggulan sebagai dasar pengembangan wilayah, mengidentifikasi daya saing komoditas unggulan, menyusun arahan kebijakan pengembangan wilayah terkait dengan komoditas unggulan. Dengan metode analisis berupa analisis data sekunder (kuantitatif) menggunakan analisis LQ (*Location Quotient*) dan SS (*Shift Share*), perwilayahan (*Standar Deviasi*), analisis peta, analisis deskriptif, analisis potensi dan masalah. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: hasil identifikasi ragam komoditas di daerah penelitian menunjukkan tidak adanya variasi jenis komoditas pada subsektor sayur mayur, buah-buahan, empon-emponan, perkebunan, perikanan tangkap, peternakan, dan industri kecil, sebaliknya komoditas subsektor tanaman pangan, tanaman hias, perikanan budidaya, kehutanan, industri menengah, industri besar dan pertambangan menunjukkan adanya variasi jenis komoditas diantara kabupaten/kotamadya di daerah penelitian, hasil identifikasi daya saing komoditas unggulan menunjukkan bahwa subsektor pertambangan memiliki daya saing paling tinggi dibandingkan dengan subsektor penghasil

lainnya di daerah penelitian. Persamaan dengan penelitian dengan penulis adalah pada analisis menggunakan peta, analisis deskripsi dan penentuan daya saing. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penentuan daya saing dalam penelitian ini pada sektor sumber daya alam, sedangkan penulis penentuan daya saing berdasarkan sumber daya manusia beserta perilakunya.

Tabel 1. Penelitian Relevan

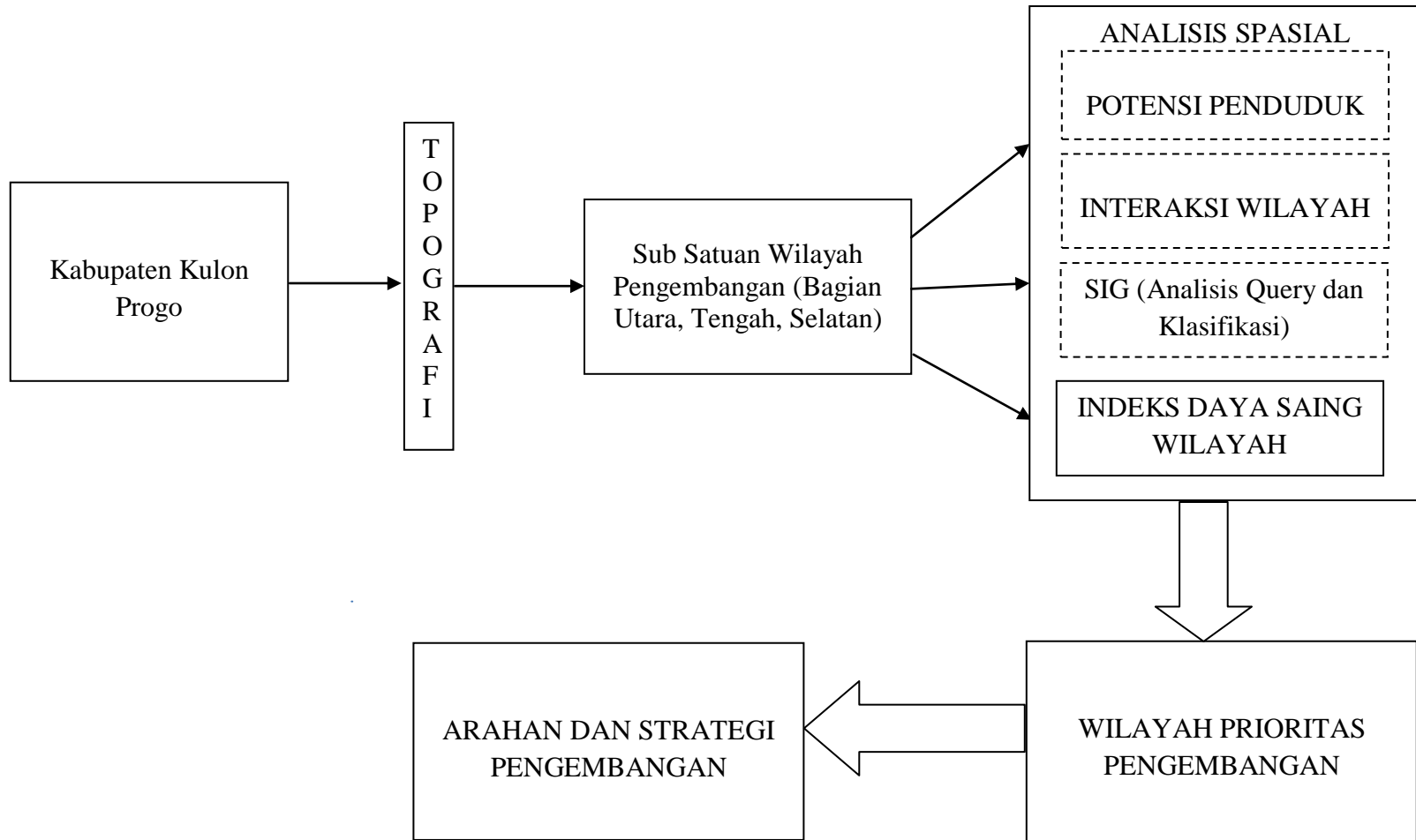
Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
Rudion, 2010, (skripsi)	Penentuan Wilayah Prioritas Pengembangan Berdasarkan Keunggulan Komparatif Sektor Pertanian Di Kabupaten Purworejo	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui WPP di wilayah Kabupaten Purworejo. - Mengetahui keunggulan komparatif sektor pertanian yang dimiliki oleh WPP Kabupaten Purworejo. - Menentukan arahan pengembangan di masing-masing WPP berdasarkan keunggulan komparatif sektor pertanian. 	Deskriptif kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi penduduk tertinggi di Kecamatan Loano Sub-SWP I, Kecamatan Kutoarjo Sub-SWP II, Kecamatan Purwodadi Sub-SWP III, dan di Kecamatan Kemiri untuk Sub-SWP IV. Nilai interaksi wilayah tertinggi pada Sub-SWP I berada diantara Kecamatan Loano-Purworejo, Sub-SWP II diantara Kutoarjo-Bayan, Sub SWP III diantara Purwodadi-Bagelen, dan pada Sub-SWP IV diantara Kecamatan Kemiri-Pituruh. - WPP Loano dan WPP Kemiri memiliki keunggulan komparatif sektor pertanian dominan pada sub-sektor perkebunan rakyat dan kehutanan, sedangkan WPP Kutoarjo dan WPP Purwodadi dominan pada keunggulan komparatif sub-sektor peternakan. - WPP dapat dikembangkan sesuai dengan keunggulan komparatif sektor pertanian.
Riswan Sepriya di Sianturi, 2010, (skripsi)	Kajian Komoditas Unggulan Dan Sebaran Keruangannya Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi ragam komoditas dan menyusun perwilayahannya. - Mengetahui ragam dan sebaran komoditas unggulan sebagai dasar pengembangan wilayah - Mengidentifikasi daya saing komoditas unggulan - Menyusun arahan kebijakan pengembangan wilayah terkait dengan komoditas unggulan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis data sekunder (kuantitatif) - analisis LQ dan SS, - Perwilayahan - AnalisisPeta - Analisis deskriptif - Analisis potensi dan masalah 	<ul style="list-style-type: none"> - Ragam komoditas di daerah penelitian menunjukkan tidak adanya variasi jenis komoditas pada subsektor sayur mayur, buah-buahan, empon-emponan, perkebunan, perikanan tangkap, peternakan, dan industri kecil, sebaliknya komoditas subsektor tanaman pangan, tanaman hias, perikanan budidaya, kehutanan, industri menengah, industri besar dan pertambangan menunjukkan adanya variasi jenis komoditas. - Daya saing komoditas unggulan menunjukkan bahwa subsektor pertambangan memiliki daya saing paling tinggi dibandingkan dengan subsektor penghasil lainnya di daerah penelitian
Ida Nurcahyani, 2010 (skripsi)	Penentuan Desa Pusat pertumbuhan Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Pengembangan Wilayah Di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui adanya variasi antar wilayah (desa) untuk sentra pengembangan sektoral di Kecamatan Plered berdasarkan sektor basis yang dimiliki. - Mengetahui faktor yang paling mendominasi dalam penentuan Desa Pusat Pertumbuhan di Kecamatan Pleret. - Mengetahui arahan pengembangan desa-desa yang terpilih sebagai pusat pertumbuhan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan wilayah di Kecamatan Pleret. 	Deskriptif, dengan teknik analisis LQ, Scoring dan deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Besarnya nilai LQ terdapat variasi tiap sektor yang dapat dijadikan prioritas pengembangan. - Hasil perhitungan indeks komposit diketahui bahwa adanya faktor-faktor dominan dalam penentuan DPP adalah ketersediaan fasilitas pelayanan dan potensi sumber daya alam, sumber daya alam-buatan yang berujung pada tingginya perkembangan wilayah. - Hasil identifikasi arahan pengembangan DPP yang terpilih diarahkan untuk kegiatan ekonomi bertumpu pada sektor sekunder dan tersier.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa pengembangan wilayah perlu memperhatikan beberapa aspek yang mampu mempengaruhi kemajuan wilayah. Pembagian wilayah (Sub-Wilayah) berdasarkan topografinya yaitu daerah dataran(selatan), pegunungan(utara), gabungan dataran dan pegunungan (tengah). Analisis yang pertama didasarkan pada analisa keruangan (*spatial*) karena terdapat pengaruh jarak (*distance*), interaksi (*interaction*), dan gerakan (*movement*) yang akan mempengaruhi penghitungan potensi penduduk dan gravitasi penduduk (kaitannya dengan besarnya interaksi wilayah).

Metode pengukuran yang kedua adalah pengukuran IDSW. IDSW ini merupakan pengukuran daya saing antar kecamatan menggunakan delapan pilar yaitu: Kondisi Makroekonomi, Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Ukuran pasar, Ketersediaan Teknologi, dan Kemudahan Berusaha.

Setelah perhitungan selesai, kemudian dianalisa secara terpadu antara data potensi penduduk dengan interaksi wilayahnya dan data daya saing antar kecamatan. Hasil perhitungannya ialah penentuan daerah prioritas pengembangan yang menjadi patokan dalam identifikasi dan inventarisasi. Setelah muncul WPP dari data analisis keruangan (analisis potensi penduduk dan interaksi penduduk) dan IDSW, sehingga dapat menghasilkan arahan pengembangan wilayah. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Skema Kerangka Pikir